# STRATEGI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH DALAM MENGURANGI HOAKS DI ERA DIGITAL

## **SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

## **CUT SYIFA ASYURA**

NIM. 210802046

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cut Syifa Asyura

NIM : 210802046

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir: Sigli, 4 Maret 2004

Alamat : Gampong Keutapang Sanggeue

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. I R

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 17 Juli 2025

Cut Syifa Asyura

NIM. 210802046

#### LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

# STRATEGI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH DALAM MENGURANGI HOAKS DI ERA DIGITAL

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**CUT SYLFA ASYURA** 

NIM. 210802046

MahasiswaProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing Skripsi

Muazzinah, B.Sc., MPA

NIP. 19841125201903201

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

## STRATEGI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH DALAM MENGURANGI HOAKS DI ERA DIGITAL

### **SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh Cut Syifa Asyura 210802046 Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 29 Juli 2025 M 4 Safar 1447 H Banda Aceh, Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Ketua, Sekretaris Ketua, Muazzinah, B.Sc., M.P.A NIP. 199407072025051005 NIP. 19841125201903201 ما معة الرانر؟ Penguji II Penguji I AR-RANIRY autum aid Amirulkamar, MM., M.Si. NIP. 198905182023211032 196110051982031007

Mengetahui,

Dekan Kalandan Mana Sosial dan Ilmu Pemerintahan

tin Ar Raniry Banda Aceh

Dr. Muii Mulia, M.Ag. NIP 1947403271999031005

#### **ABSTRAK**

Penyebaran hoaks di era digital telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama di Provinsi Aceh, dimana penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu konflik sosial, kerusuhan, dan merusak citra daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Diskominsa dalam mengurangi hoaks di era digital serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Diskominsa dalam mengurangi hoaks di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Diskominsa dalam mengurangi hoaks di era digital telah menunjukkan tingkat efektivitas tertentu. strategi yang diterapkan oleh Diskominsa dalam mengurangi hoaks di era digital merupakan menciptakan aplikasi HoaxDB, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya hoaks. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu kecepatan penyebaran informasi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memperbarui HoakDB dengan fitur pelaporan interaktif, memperluas pelatihan literasi digital, menambah anggaran untuk konten edukatif dan melakukan evaluasi berkala guna menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya di Aceh.



#### KATA PENGANTAR

Allhamdulillah peneliti sangat bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Shalawat dan salam peneliti junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dalam Mengurangi Hoaks di Era Digital."

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. R. A. N. I. R. Y.
- 2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing tugas akhir. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan motivasi yang telah ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
- 4. Dr. Delfi Suganda, LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
- 6. Teristimewa kepada cinta pertama, Bapak T.Affandi yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada peneliti dan tak pernah lelah untuk membimbing dan memberikan pengorbanannya. Terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tahap pendidikan ini.
- 7. Pintu surgaku, Ibunda Dewi Fajri, terimakasih atas segala doa, cinta, motivasi dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu dan terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang peneliti tempuh. Ibu, sujudmu selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anakmu, ragamu memang sakit, tapi doamu selalu menembus langit.
- 8. Kautsar Rahmatillah, seseorang yang selalu ada, terimakasih telah memberikan dukungan tanpa henti, memberikan semangat, dan selalu meyakinkan peneliti bahwa peneliti bisa mencapai impiannya, you have done too much good for me, thank you for existing!
- 9. Kepada Fazira Putri Salsabilla, Cut Aulia Suci Ranosa, Maulida fachrina dan Cut Mutia yang telah banyak membantu dan menemani setiap proses penulisan skripsi ini. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan peneliti sendirian, selalu menjadi garda terdepan di saat peneliti membutuhkan bantuan.
- 10. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri Cut Syifa Asyura. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk semua do'a yang kau panjatkan dalam diam, untuk semua malam yang kau lewati dengan dada sesak tapi tetap memilih esok. Terima kasih karena tidak menyerah. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Berbahagialah selalu di manapun kamu berada, syifa. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri!

## **DAFTAR ISI**

## HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARY	A ILMIAHi
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIM	IBINGii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	MUNAQASYAHiii
KATA PENGANTAR	
	vii
	ix
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Pen <mark>elitian</mark>	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	99 1111
2.2. Teori Strategi	11
2.2.1. Tujuan	11
2.2.2. Kebijakan AR-RA	N I R Y12
2.2.3. Program	
2.3. Konsep Digitalisasi	
2.4. Kerangka Pemikiran	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Desain Penelitian	19
3.2. Fokus Penelitian	20
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.4. Sumber Data	21
3.5. Informan	21
3.6. Teknik Pengumpulan Data	22

3.7. Teknik Pengolahan Data
3.8. Teknik Analisis Data
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN27
4.1. Gambaran Umum Lembaga/ Lokasi Penelitian
4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian
4.2.1. Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam Mengurangi Hoaks di Era Digital
4.2.1.1. Tujuan
4.2.1.2. Kebijakan
4.2.1.3. Program53
4.3. Tantangan Yang Dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Dalam Mengurangi Hoaks di Era Digital
4.3.1. Kecepatan Penyebaran dan Viralitas56
4.3.2. Kurangnya Anggaran59
4.3.3. Rendahnya Literasi Digital61
BAB V PENUTUP64
5.1. Kesimpulan 64
5.2. Saran
DAFRTAR PUSTAKA جا معةالرانوك 66
Lampiran A.R R.A.N.I.R.Y. 69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu		9
Tabel 3.1. Fokus Penelitian		20
Tabel 3.2. Informan Penelitian		22
Tabel 4.1. Tabel Program		56
	A	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Hoax Per Tahun	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	18
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Diskominsa	42
Gambar. 4.2. Brosur Generasi Anti Hoaks	54
Gambar 4.3 Tolkshow atau Socialisasi	55



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Bimbingan Skripsi	69
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.	70
Lampiran 3. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian	71
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	70



#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Di zaman digital, penyebaran hoaks semakin marak dan cepat, termasuk di Provinsi Aceh. Maraknya penyebaran hoaks di era digital telah menjadi tantangan global. Hoaks yang beredar di masyarakat dapat memicu perpecahan sosial, kerusuhan, dan memanipulasi opini publik. Hoaks yang beredar seringkali mengandung informasi yang menyesatkan dan dapat memicu perpecahan sosial, kerusuhan, serta merusak citra daerah. Dengan demikian, peran Diskominsa menjadi sangat krusial dalam upaya mengurangi dampak negatif dari hoaks.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yaitu instansi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi pada suatu wilayah, serta memiliki tugas untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi publik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, tantangan Diskominisa untuk menyediakan layanan informasi juga semakin kompleks seperti disinformasi, hoaks, dan polarisasi digital menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan memanipulasi opini publik.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah khususnya Diskominsa, menjadi sangat penting. Sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi dan komunikasi, Diskominsa memiliki mandat untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat merupakan akurat serta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maharani, Regina, et al. "Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Ciamis." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1.3 2023: 342-353.

dapat dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diantaranya pasal 27 ayat (3) yaitu setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian material dan/atau immateril kepada orang lain atau perbuatan yang berakibat terganggunya ketertiban umum atau menimbulkan keonaran di masyarakat. Dan pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan konten yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik yang dapat timbul akibat penyebaran informasi yang merugikan.<sup>3</sup>

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan ini dibuat untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari segala jenis penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam revisi Undang-Undang ITE yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, terdapat beberapa perubahan signifikan pada Pasal 27 untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari pasal karet. Perubahan pada Pasal

<sup>2</sup> Budiharto, M. *Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial: Analisis Kritis dan Upaya Penanggulangan.* Yogyakarta: Deepublish 2018

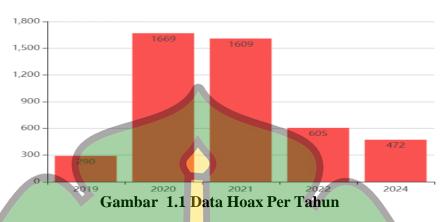
<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

27 dalam UU ITE yang baru secara signifikan mereformasi aturan hukum di ruang digital. Pertama, larangan konten kesusilaan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat 1 kini dihapus dan dialihkan pengaturannya ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih aturan dan memberikan definisi yang lebih jelas. Kedua, ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 diubah menjadi delik aduan, yang berarti proses hukum hanya bisa berjalan jika korban secara langsung melaporkan kasus tersebut, sekaligus diperjelas definisinya untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas. Terakhir, definisi larangan perjudian dan pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat 2 dan 4 juga diperjelas dengan penambahan frasa-frasa baru, memastikan pasal ini tidak bisa digunakan untuk menjerat pihak yang tidak bersalah.

Menurut laporan yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sepanjang periode 2022 terdapat 2.099 konten hoaks yang teridentifikasi dan ditangani di Indonesia. Diskominsa tercatat sebagai sebuah wilayah dengan jumlah konten hoaks terbanyak di Indonesia. Berbagai isu sensitif terkait agama, politik, bencana alam, dan isu sosial lainnya sering menjadi target penyebaran hoaks di Aceh.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022).

#### **Data Hoax Per Tahun**



Data dari Aplikasi HoaxDB yang dikelola oleh Diskominsa bahwa jumlah hoaks yang teridentifika<mark>si</mark> di Aceh <mark>mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga</mark> 2024. Pada tahun 2019, jumlah hoaks tercatat 290 kasus, didominasi isu politik pasca-pemilu dan kesehatan palsu seperti klaim vaksin penyebab autisme. Kemudian pada tahun 2020, jumlah hoaks meningkat tajam menjadi 1.669 kasus, akibat pandemi COVID-19, dengan hoaks penolakan virus, konspirasi vaksin, dan diskriminasi terhada<mark>p tenaga kesehatan. Dan</mark> pada tahun 2021, jumlah hoaks sedikit menurun menja<mark>di 1,609 kasus, pada tahu</mark>n ini terdapat hoaks mengenai vaksin haram dan politik lokal, termasuk narasi "bencana azab" pasca banjir. Di tahun 2022, jumlah hoaks kembali turun secara signifikan menjadi 605 kasus, karena berhasil dicapai melalui strategi Diskominsa dan penegakan hukum, meski isu BBM dan Palestina tetap beredar. Sementara itu, di proyeksi tahun 2024, jumlah hoaks diperkirakan akan turun lagi menjadi 472 kasus, menunjukkan ancaman baru berupa hoaks pemilu, penculikan anak, dan konten deepfake berbasis AI. Penurunan jumlah hoaks di tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa upaya-upaya penanganan hoaks oleh pemerintah daerah dan masyarakat Aceh mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun, angka 472 hoaks pada proyeksi 2024 masih cukup tinggi, sehingga diperlukan kerja keras yang terusmenerus untuk menekan penyebaran hoaks di Aceh.<sup>5</sup>

Penyebaran hoaks di Aceh adalah permasalahan yang rumit yang perlu ditangani secara menyeluruh. Selain upaya pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam memerangi hoaks. Dengan meningkatkan literasi digital dan kritis terhadap informasi, kita dapat bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat dan bebas dari hoaks. Diskominsa telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengurangi penyebaran hoaks dalam era digital di wilayahnya seperti, melakukan sosialisasi dan edukasi literasi digital, memantau media sosial, fakta, melakukan verifikasi menyebarluaskan informasi akurat, serta berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menindak tegas penyebar hoaks yang melanggar hukum.6

Salah satu strategi Diskominsa untuk mengurangi hoaks yaitu dengan menciptakan aplikasi HoaxDB. Aplikasi HoaxDB adalah sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh Diskominsa untuk mengurangi penyebaran hoaks. HoaxDB adalah sebuah database yang berisi kumpulan berita- berita hoaks yang telah terverifikasi. Tujuan utama dari aplikasi HoaxDB adalah untuk memberdayakan masyarakat Aceh dalam mengidentifikasi dan melaporkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi ini menghadirkan sebuah wadah yang memudahkan pengguna dalam memeriksa kebenaran suatu berita atau informasi yang mereka terima. Maka dengan

<sup>5</sup> Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, "Hoax Db: Database Berita Hoaks," <a href="https://hoaxdb.acehprov.go.id/statistik">https://hoaxdb.acehprov.go.id/statistik</a>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh,https://diskominfo.acehprov.go.id/

kehadiran aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mengecek kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya lebih lanjut.

Diskominsa menghadapi beragam hambatan atau tantangan mengenai upayanya untuk mengurangi penyebaran hoaks di era digital terutama di Provinsi Aceh. Salah satu tantangan utama adalah luasnya cakupan wilayah serta banyaknya jumlah penduduk di Aceh, yang menyulitkan pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan program edukasi dan sosialisasi mengenai hoaks. Kemajuan teknologi digital yang sangat pesat, terutama munculnya berbagai platform media sosial baru, juga menjadi tantangan tersendiri bagi Diskominsa, dikarenakan sulit diawasi dan dikendalikan secara efektif.<sup>7</sup>

Selain itu, Kekurangan tenaga kerja, dana, serta sarana teknologi yang tersedia oleh dinas terkait juga menyulitkan mereka dalam menjalankan program-program pencegahan hoaks secara komprehensif. Hambatan lain yang dihadapi adalah adanya kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu yang berusaha memanfaatkan hoaks untuk mencapai tujuan mereka, sehingga sulit untuk menghentikan penyebarannya. Kurangnya koordinasi dan sinergi Diskominsa bersama pemangku kepentingan lainnya, seperti media, akademisi, dan komunitas masyarakat, juga menjadi tantangan tersendiri dalam menangani masalah hoaks di Aceh.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks di Era Digital: Studi Kasus Provinsi Aceh. Badan Litbang Provinsi Aceh, 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Syahputra, Andi, and Yuliana Safitri. "Challenges in Combating Hoaxes and Misinformation: A Case Study of the Aceh Provincial Government." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 12, no. 3, 2021.

Di zaman digital yang ditandai oleh kemudahan dalam menyebarkan informasi, penyebaran berita palsu dapat berlangsung secara cepat dan meluas.menimbulkan kebingungandan ketidakpercayaan di masyarakat. Stabilitas informasi membantu menjaga kredibilitas sumber informasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh data dan fakta yang terpercaya. Upaya Diskominsadalam mengurangi hoaks, seperti verifikasi informasi, edukasi publik, dan kerja sama dengan platform digital, turut berkontribusi pada terciptanya stabilitas informasi. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta mendorong Pembangunan yang berkelanjutan di era transformasi digital. Stabilitas informasi menjadi pondasi penting bagi efektivitas peran Diskominsa menangkal penyebaran hoaks serta menjaga kepercayaan publik.9

Karena itu, penting untuk melakukan penelitian agar dapat memahami secara lebih mendalam. tentang "Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Dalam mengurangi hoaks di Era Digital" secara spesifik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

## 1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Informasi yang beredar luas di kalangan masyarakat kebanyakan merupakan informasi yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dan luasnya cakupan wilayahserta banyaknya jumlah penduduk di Aceh, sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk menjangkau seluruh

-

 $<sup>^9</sup>$  Dinas Kominfo Aceh Tekankan Pentingnya Stabilitas Informasi untuk Pembangunan, Harian Serambi Indonesia, 10 July 2022.

lapisan masyarakat dengan program edukasi dan sosialisasi mengenai hoaks.

## 1.3. Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Diskominsa dalam mengurangi penyebaran hoaks di era digital?
- 1.3.2 Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Diskominsa dalam mengurangi penyebaran hoaks di era digital?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Menganalisis strategi yang dilakukan oleh Diskominsa dalam Meminimalkan penyebaran informasi palsu serta mengenali hambatan yang dihadapi oleh Diskominsa dalam mengurangi penyebaran hoaks di era digitalisasi.

# 1.5. Manfaat Penelitian جا معة الرائر

Manfaat dari penelitian ini Nadalah untuk memperoleh pemahaman mengenai langkah-langkah yang diterapkan oleh Diskominsa, sehingga dapat mendukung peningkatan efektivitas dalam menangani penyebaran hoaks. Dan mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi agar dapat membantu mengembangkan solusi yang lebih tepat sasaran. penelitian ini juga diharapkan mampu mengevaluasi peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam mengurangi hoaks. Manfaat tersebut pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya iklim informasi yang sehat di Aceh, khususnya di era digital yang semakin rentan terhadap penyebaran hoaks.